



PERSPEKTIF *ACCOUNT REPRESENTATIVE* ATAS STRATEGI PENGHINDARAN PAJAK KORPORASI DI INDONESIA

^{1*}Dwi Utomo, ²Ana Sopanah, ³Nasharuddin Mas

^{1,2,3}Universitas Widya Gama Malang, Indonesia

*Correspondence Author e-mail: dwiut86@gmail.com

INFO ARTIKEL

Article History:

Received: 2026-01-21

Revised: 2026-03-09

Accepted: 2026-04-07

Kata Kunci:

Penghindaran Pajak Badan,
Perwakilan Akuntansi,
Tinjauan Pustaka Sistematis,
Pajak Korporasi

Keywords:

Corporate Tax Avoidance,
Accounting Representation,
Systematic Literature Review,
Corporate Tax

ABSTRAK

Penghindaran pajak korporasi merupakan fenomena global yang secara signifikan mengikis basis pendapatan negara, terutama di Indonesia, di mana struktur fiskal sangat bergantung pada Pajak Penghasilan Korporasi. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi mode penghindaran pajak yang dominan dalam literatur global, mengeksplorasi pengalaman *Account Representatives (AR)* dalam mendeteksi praktik-praktik tersebut di lapangan, menganalisis pola penyembunyian beban pajak oleh Wajib Pajak Korporasi, dan merumuskan model pengawasan yang efektif. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini bersifat kualitatif, menggabungkan dua metode pengumpulan data. Pertama, *Systematic Literature Review (SLR)* yang dilakukan menggunakan aplikasi *Watase UAKE* untuk mengidentifikasi dan menyaring 40 artikel relevan dari basis data *Scopus* dan *Emerald* untuk periode 2015–2025. Kedua, wawancara mendalam dengan empat *AR* yang dianalisis menggunakan perangkat lunak *NVivo*. Hasil menunjukkan bahwa mode global utama seperti rekayasa akuntansi, pengalihan laba, dan pemanfaatan insentif beradaptasi menjadi bentuk lokal yang unik, termasuk penyamaran biaya pajak penghasilan yang dipotong menjadi akun biaya lain dan pengalihan laba domestik antara entitas terkait. Kesimpulan menegaskan bahwa efektivitas pengawasan *AR* sangat bergantung pada analisis rasio keuangan, pengujian keberadaan, dan profil risiko, namun tetap dibatasi oleh data perbandingan harga transfer yang terbatas dan batas wewenang struktural.

ABSTRACT

Corporate tax avoidance is a global phenomenon that significantly erodes the state revenue base, particularly in Indonesia, where the fiscal structure relies heavily on Corporate Income Tax. This study aims to identify dominant tax avoidance modes in global literature, explore the experience of *Account Representatives (AR)* in detecting these practices in the field, analyze tax burden concealment patterns by Corporate Taxpayers, and formulate an effective supervision model. The approach used in this study is qualitative, combining two data collection methods. First, a *Systematic Literature Review (SLR)* conducted using the *Watase UAKE* application to retrieve and screen 40 relevant articles from *Scopus* and *Emerald* databases for the 2015–2025 period. Second, in-depth interviews with four *ARs* analyzed using *NVivo* software. The results indicate that major global modes such as accounting engineering, profit shifting, and incentive utilization adapt into unique local forms, including the disguising of with holding tax expenses into other expense accounts and domestic profit shifting between related entities. The conclusion confirms that the effectiveness of *AR* supervision relies heavily on financial ratio analysis, existence testing, and risk profiling, yet remains constrained by limited transfer pricing comparative data and structural authority boundaries.



PENDAHULUAN

Dalam dua puluh tahun terakhir, isu penghindaran pajak korporasi/badan (corporate tax avoidance) menjadi salah satu topik utama dalam literatur ekonomi, keuangan publik, dan tata kelola global. Masalah ini terkait dengan perubahan struktur ekonomi dunia, globalisasi rantai pasok, digitalisasi aktivitas bisnis, serta meningkatnya kompleksitas transaksi lintas negara. Perusahaan multinasional memiliki kemampuan yang semakin besar untuk memindahkan laba, mengatur struktur grup, dan mengoptimalkan beban pajak melalui yurisdiksi bertarif rendah atau tax havens. Berbagai studi menunjukkan bahwa praktik profit shifting telah mencapai skala yang sangat besar (Janský & Palanský, 2019); (OECD, 2015); (UNCTAD, 2015). Selain itu, The State of Tax Justice (2024) memperkirakan bahwa dunia kehilangan hampir US\$ 492 miliar setiap tahun akibat kombinasi praktik penghindaran pajak dan pengelakan pajak yang dilakukan oleh korporasi dan individu, yang mencerminkan skala persoalan yang sangat besar dan berdampak langsung terhadap kapasitas pembiayaan pembangunan publik.

Di tingkat nasional, perpajakan Indonesia juga menghadapi kendala karena rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia masih relatif rendah dibandingkan standar kawasan dan negara-negara maju (OECD, 2025). Kondisi ini berkaitan dengan sempitnya basis pajak, termasuk basis PPh Orang Pribadi, sehingga struktur penerimaan relatif bertumpu pada PPN dan PPh Badan. Dalam struktur penerimaan yang sangat bergantung pada pajak, erosi basis PPh Badan melalui tax avoidance berpotensi berdampak signifikan terhadap ruang fiskal. Berbagai kajian menunjukkan bahwa penghindaran pajak korporasi menurunkan penerimaan pajak perusahaan dan dapat memengaruhi komposisi penerimaan antara pajak langsung dan tidak langsung di tingkat nasional (Bilicka et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, motif ekonomi ini diperkuat oleh struktur industri yang didominasi kelompok usaha besar yang memiliki akses terhadap konsultan pajak, jaringan internasional, serta pemahaman regulasi yang lebih mendalam (Desai & Dharmapala, 2006); (Frank et al., 2009).

Selain faktor internal perusahaan, kelemahan administrasi perpajakan dan besarnya tax gap menunjukkan masih adanya potensi penerimaan yang belum termobilisasi, baik melalui *compliance gap* maupun *policy gap* (World Bank, 2025). Transformasi digital dalam administrasi perpajakan Indonesia telah mengubah secara signifikan cara otoritas pajak mengelola basis data dan melakukan pengawasan, sehingga Account Representative (AR) tidak lagi sekadar pelaksana tugas administratif, tetapi juga berperan sebagai analis yang harus mampu membaca pola data dan menafsirkan perilaku Wajib Pajak Badan. Dengan melihat kuatnya ketergantungan APBN pada penerimaan pajak, besarnya tax gap PPN dan PPh Badan, serta kompleksitas strategi penghindaran pajak korporasi, diperlukan bukti empiris yang tidak hanya bersumber dari data laporan keuangan tetapi juga dari pengalaman praktis aparat pajak di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan *Account Representative* (AR) sebagai informan kunci untuk memahami bagaimana strategi *tax avoidance* beroperasi, beradaptasi, dan dinegosiasikan dalam praktik pengawasan perpajakan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Corporate Tax Avoidance

Hanlon & Heitzman (2010) menyatakan bahwa *corporate tax avoidance* pada dasarnya berakar pada konflik keagenan, praktik pengelolaan laba, dan kesenjangan informasi, sehingga strategi pengurangan beban pajak sering dirancang melalui pemanfaatan kompleksitas regulasi dan celah informasi.



Account representative

Account Representative (AR) merupakan pejabat pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berfungsi sebagai *frontline officer* dalam memastikan kepatuhan perpajakan wajib pajak. Berdasarkan PMK-45/PMK.01/2021, yang dirangkum dalam Materi Lanjutan *Account Representative* DJP (2025: 11), AR didefinisikan sebagai jabatan pelaksana yang bertugas melaksanakan analisis, pengelolaan data, pengawasan, dan tindak lanjut dalam rangka memastikan wajib pajak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Systematic Literature Review

Dalam menyusun strategi yang tepat berbasis data dan landasan teori yang kuat, pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) digunakan sebagai metode ilmiah yang terstruktur dan sistematis. SLR dirancang untuk meminimalkan bias dan interpretasi subjektif dalam pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber ilmiah (Kitchenham & Charters, 2007). Tujuan utama SLR adalah mengidentifikasi, menyeleksi, mengevaluasi secara kritis, serta mensintesis seluruh studi yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Melalui pendekatan ini, peneliti memperoleh pemahaman komprehensif terhadap tren metodologis dan kesenjangan dalam literatur (Borrett et al., 2018).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan secara komprehensif bagaimana penelitian dilaksanakan, mencakup desain penelitian, populasi dan informan, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif untuk memahami fenomena penghindaran pajak korporasi yang bersifat kompleks dan kontekstual. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, pengalaman, dan praktik aktor yang terlibat secara mendalam, yang tidak dapat direpresentasikan melalui data kuantitatif semata (Cresswell, 2019); (Merriam & Tisdell, 2016).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semiterstruktur dengan *Account Representative* (AR) di KPP Madya dan KPP Khusus PMA yang memiliki pengalaman kerja panjang dalam pengawasan wajib pajak badan. Data sekunder dikumpulkan melalui *Systematic Literature Review* (SLR) menggunakan basis data Scopus serta dokumen resmi perpajakan nasional. Teknik pengumpulan data ini memungkinkan triangulasi antara pengalaman empiris dan temuan global, sehingga memperkuat kedalaman dan konteks analisis (Kitchenham & Charters, 2007); (Page et al., 2021).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik, dengan bantuan perangkat lunak NVivo untuk data wawancara dan Watase Uake untuk sintesis SLR. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, member checking, audit trail, serta reflektivitas peneliti guna meningkatkan kredibilitas dan dependabilitas temuan Lincoln & Guba, (1985); Braun & Clarke, (2006). Prosedur ini memastikan bahwa hasil penelitian bersifat sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 40 artikel internasional bereputasi, penelitian ini menemukan delapan kategori utama strategi penghindaran pajak badan (lihat Tabel 1). Tiga strategi yang paling dominan adalah rekayasa akuntansi dan laba, *profit shifting*, serta pemanfaatan insentif dan ketentuan fiskal. Dominasi ketiga strategi tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak badan secara global terutama memanfaatkan perbedaan perlakuan fiskal-komersial, arbitrase regulasi, dan asimetri informasi antara perusahaan dan otoritas pajak, sebagaimana konsisten dengan temuan literatur berbasis teori

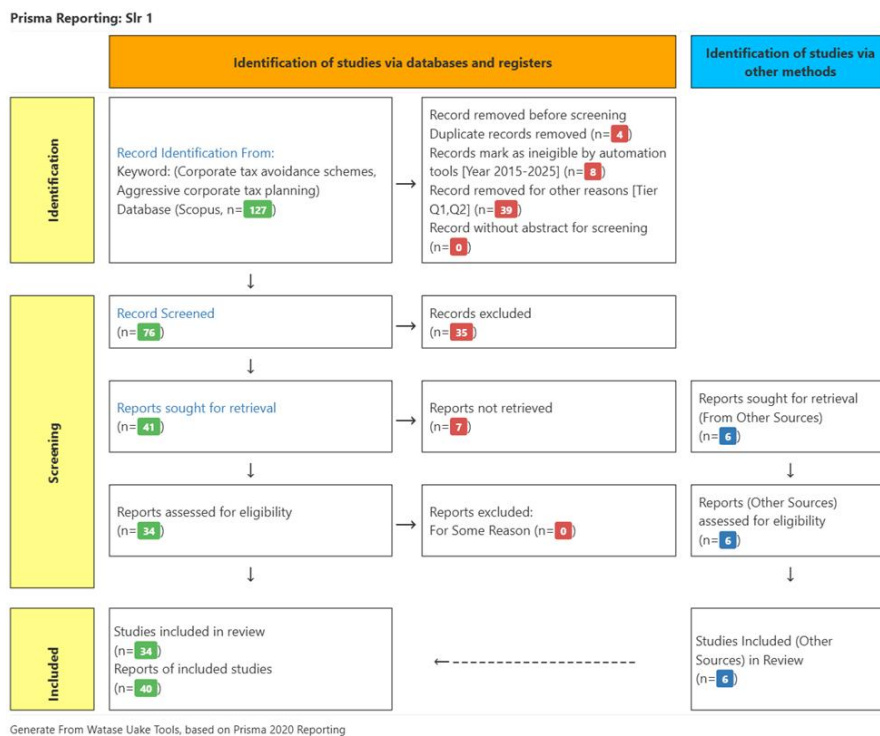


agensi dan legitimasi terdahulu (Armstrong et al., 2019); (Menicacci, 2025; (Bilicka et al., 2023), (Saptono et al., 2024), (Hermawati, Mas, et al., 2025).

Tabel 1. Temuan Strategi Penghindaran Pajak Badan pada SLR

No	Kategori Strategi	Penjelasan singkat
1	Rekayasa akuntansi dan laba	Manipulasi BTD, akrual, impairment untuk menurunkan laba kena pajak.
2	Profit shifting lintas yurisdiksi	TP agresif, OFC, SPE, pemanfaatan intangible, royalti, dan fee lintas negara.
3	Pemanfaatan insentif dan ketentuan fiskal	Re-shuffling aset, super depreciation, pemanfaatan tax-exempt income, dsb.
4	Koneksi politik dan donasi politik	Perlindungan politik, lobbying, kontribusi kampanye yang berkorelasi dengan ETR rendah.
5	Peran intermediaris profesional	Big4, konsultan pajak, return preparer sebagai arsitek dan fasilitator skema.
6	Tekanan eksternal dan ketidakpastian	Respons terhadap krisis, ETS karbon, policy uncertainty yang mendorong tax sheltering.
7	Pengaburan informasi dan manajemen kesan	CSR sebagai tameng, narrative tone positif, trade secrets, deliberate opacity.
8	Imitasi dan difusi strategi	Peniruan strategi pajak kompetitor atau jaringan sektoral (tax mimicking).

Selain tabel 1 diatas, proses seleksi studi dapat dirangkum dalam bagan alir PRISMA pada gambar 1, dibawah ini:



Gambar 1. Bagan Prisma, 2020



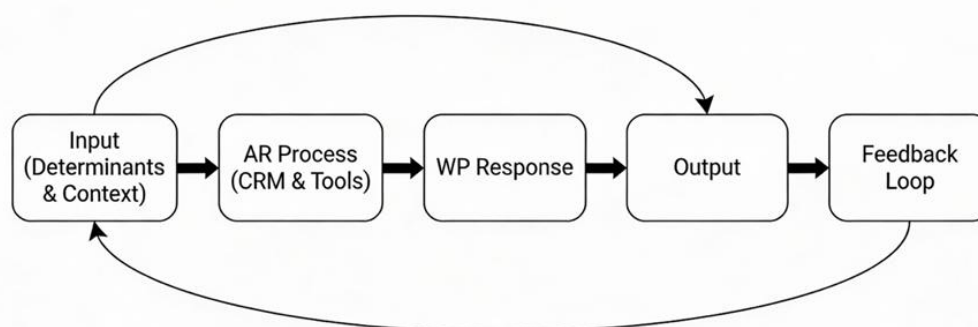
Hasil Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan terhadap empat orang Account Representative (R001–R004) yang bertugas pada KPP PMA Satu, KPP PMA Dua, KPP Madya Jakarta Pusat, dan KPP Madya Dua Surabaya, Keempat informan tersebut memiliki masa kerja antara 13 sampai 17 tahun di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (lihat **Tabel 2**). Temuan ini menegaskan bahwa penghindaran pajak di level pengawasan sering kali bersifat berbasis akun dan klasifikasi, bukan selalu melalui skema lintas yurisdiksi yang kompleks (Wahab et al., 2017).

Tabel 2. Identitas Informan

Kode	Nama KPP	Masa Kerja
R001	KPP PMA Satu	16 tahun
R002	KPP PMA Dua	10 tahun
R003	KPP Madya Surabaya Dua	15 tahun
R004	KPP Madya Jakarta Pusat	13 tahun

Secara teoretis, temuan tersebut mengonfirmasi relevansi *Agency Theory* dalam menjelaskan insentif manajerial dan korporasi untuk menekan beban pajak melalui pengelolaan laporan dan struktur transaksi, di tengah asimetri informasi yang dihadapi otoritas pajak. Pada saat yang sama, temuan lapangan memperluas literatur dengan menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak selalu berbentuk skema kompleks lintas negara, melainkan sering bersifat *account-driven* dan administratif, sehingga mendukung argumen literatur mengenai pentingnya konteks kelembagaan dan kapasitas pengawasan dalam menentukan efektivitas penegakan (Sikka, 2015), (Wahab et al., 2017), (Wartono et al., 2025), (Reinati et al., 2025).

Penelitian ini juga menemukan bahwa rasio seperti *Effective Tax Rate* (ETR) dan CTTOR digunakan AR sebagai indikator awal (*alarm risk*), bukan dasar koreksi langsung. Efektivitas pengawasan AR dibatasi oleh keterbatasan data pembandingan, kualitas pengungkapan laporan keuangan, serta perbedaan kewenangan antara fungsi pengawasan dan pemeriksaan. Kondisi ini menghasilkan *enforcement gap* di mana indikasi risiko telah teridentifikasi, namun tidak selalu dapat dikunci secara hukum pada tahap pengawasan, lihat pada Gambar 2 (Amin et al., 2023), (Cho, 2020).



Gambar 2. Learning System Pengawasan

Temuan hasil SLR dan wawancara secara eksplisit menjawab rumusan masalah pertama dan kedua dengan menunjukkan bahwa teori agensi tetap relevan dalam menjelaskan penghindaran pajak badan, khususnya melalui insentif manajerial dan asimetri informasi.



Namun, bukti empiris AR menunjukkan bahwa teori tersebut perlu dimodifikasi dengan memasukkan dimensi kelembagaan dan administratif, karena keterbatasan kapasitas pengawasan dan data pembanding turut membentuk ruang penghindaran pajak (Konrad, 2017); (Ajdacic et al., 2021), (Hermawati, Ariyanto, et al., 2025), (Hermawati et al., 2024).

Strategi adaptasi AR, seperti uji eksistensi, relevansi, ketentuan fiskal (3M), analisis komparatif laporan keuangan multi-tahun, pembacaan CaLK, serta pendekatan *follow the money* menunjukkan praktik *risk-based supervision* yang sejalan dengan kerangka *Compliance Risk Management*. Dalam perspektif *Slippery Slope Framework*, praktik ini mencerminkan upaya menyeimbangkan *power of authorities* melalui eskalasi pemeriksaan dan *trust in authorities* melalui persuasi dan klarifikasi, sehingga kepatuhan dapat dibangun secara bertahap (Kirchler et al., 2008), (Saptono et al., 2024).

Secara konseptual, penelitian ini mengonfirmasi temuan literatur internasional mengenai dominasi rekayasa akuntansi dan *profit shifting*, sekaligus menghasilkan kontribusi baru dengan menyoroti mekanisme mikro penghindaran pajak seperti *masking* beban pajak dan *profit shifting* domestik yang jarang tertangkap dalam studi kuantitatif berbasis ETR/BTD. Sintesis hasil dan pembahasan ini menghasilkan model pengawasan AR berbasis siklus Input, Process, Response, Output, Feedback (IPROF) yang ditampilkan pada Gambar 2, yang memodifikasi teori agensi dan kepatuhan dengan memasukkan dinamika kelembagaan administrasi pajak di Indonesia (Sikka, 2015), (Klassen et al., 2016).

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Studi ini menunjukkan bahwa tujuan menganalisis strategi penghindaran pajak korporasi telah tercapai dengan identifikasi delapan kategori strategi global, di mana rekayasa laba, pengalihan laba, dan penggunaan insentif fiskal merupakan strategi yang paling dominan. Dalam konteks Indonesia, strategi-stategi ini diadaptasi ke dalam bentuk lokal yang sesuai dengan karakteristik peraturan pajak maupun praktik administratif, seperti penyembunyian beban pajak dan pengalihan laba domestik. Keselarasan antara isu penghindaran pajak dan kebutuhan pengawasan tercermin dalam peran strategis Perwakilan Akun (AR), sebagai pelaksana pengawasan berbasis risiko, meskipun efektivitasnya masih dibatasi oleh keterbatasan data, kualitas laporan keuangan, serta wewenang.

Penerapan model pengawasan AR yang diformulasikan dalam studi ini menunjukkan pencapaian konseptual dalam menjembatani teori dan praktik melalui integrasi pendekatan kekuasaan dan kepercayaan, sehingga menjelaskan dinamika munculnya, deteksi, dan penanganan strategi penghindaran pajak korporasi dalam administrasi pajak Indonesia.

Sebagai tindak lanjut, disarankan untuk memperkuat regulasi pajak dan infrastruktur data, meningkatkan sensitivitas Sistem Manajemen Risiko Kepatuhan terhadap strategi penghindaran pajak lokal, serta mengembangkan kapasitas teknis dan komunikatif AR. Bagi wajib pajak korporasi, diperlukan pereseran praktik perencanaan pajak menuju transparansi, substansi ekonomi, dan tata kelola yang baik.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan informan dengan melibatkan lebih banyak AR dari berbagai jenis KPP, termasuk pemeriksa dan konsultan pajak, sehingga model pengawasan yang dihasilkan dapat diuji dan diperkaya dari berbagai sudut pandang. Selain itu, kombinasi pendekatan kualitatif dengan analisis kuantitatif berbasis ETR, BTD, dan data multi-tahun WP Badan akan memungkinkan pengujian empiris yang lebih kuat terhadap hubungan antara profil risiko, strategi penghindaran pajak, dan efektivitas intervensi pengawasan yang diusulkan dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, E. A., Ariff, A. M., Madah Marzuki, M., & Mohd Sanusi, Z. (2017). Political connections, corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 25(3), 424–451. <https://doi.org/10.1108/ARA-05-2016-0053>
- Ajdacic, L., Heemskerck, E. M., & Garcia-Bernardo, J. (2021). The Wealth Defence Industry: A Large-scale Study on Accountancy Firms as Profit Shifting Facilitators. *New Political Economy*, 26(4), 690–706. <https://doi.org/10.1080/13563467.2020.1816947>
- Amin, M. R., Akindayomi, A., Sarker, M. S. R., & Bhuyan, R. (2023). Climate policy uncertainty and corporate tax avoidance. *Finance Research Letters*, 58, 104581. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104581>
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., & Larcker, D. F. (2012). The incentives for tax planning. *Journal of Accounting and Economics*, 53(1–2), 391–411. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2011.04.001>
- Bilicka, K. A., Dubinina, E., & Janský, P. (2023). Fiscal Consequences of Corporate Tax Avoidance. *IES Working Paper*, 13. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4449544>
- Borrett, S. R., Sheble, L., & Lemke, T. (2018). Using system dynamics to develop a simulation model of SLR processes. *Environmental Modelling & Software*, 109, 190–202. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2018.08.003>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Cho, H. (2020). Sustainable tax behavior of MNEs: Effect of international tax law reform. *Sustainability (Switzerland)*, 12(18). <https://doi.org/10.3390/su12187738>
- Cresswell, J. W. (2019). *Research Design; Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Pustaka Pelajar.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>
- Hermawati, A., Ariyanto, R. D., Sembhodo, A. T., & Yuniar, A. (2025). HOLISTIC APPROACH: HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, MULTI-MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION OF BIG DATA TECHNOLOGY AS A SUSTAINABILITY STRATEGY FOR THE EAST. *International Conference of Business and Social Sciences*.
- Hermawati, A., Mas, N., & Yuniar, A. (2025). Systematic Literature Review (SLR) untuk Kelestarian Pariwisata: Mengintegrasikan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Model Manajemen, dan Teknologi Big Data. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 14(2). <https://journal.stiem.ac.id/index.php/jureq>
- Hermawati, A., Sembhodo, A. T., & Panunjul, N. M. (2024). Application of Agglomerative Hierarchical Clustering in Grouping Tourism Industry Smes in East Java. *International Conference of Business and Social Sciences*, 70–86. <https://doi.org/10.24034/icobuss.v4i1.481>
- Janský, P., & Palanský, M. (2019). Estimating the scale of profit shifting and tax revenue losses related to foreign direct investment. In *International Tax and Public Finance* (Vol. 26, Issue 5). Springer US. <https://doi.org/10.1007/s10797-019-09547-8>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The



- “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kitchenham, B., & Charters, S. M. (2007). *Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering* (Keele University (ed.); Vol. 1). Technical Report EBSE-2007-01.
- Klassen, K., Lisowsky, P., & Mescall, D. (2016). The role of auditors, non-auditors, and internal tax departments in corporate tax aggressiveness. *The Accounting Review*, 91, 179–205.
- Konrad, K. A. (2017). Dynamics of the Market for Corporate Tax-Avoidance Advice. *Scandinavian Journal of Economics*, 123(1), 267–294. <https://doi.org/10.1111/sjoe.12389>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.
- Menicacci, L. (2025). Real effects of investment tax incentives: Evidence from Italian private firms. *Journal of Management and Governance*, 29(2), 409–451. <https://doi.org/10.1007/s10997-024-09733-9>
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (Fourth Edi). Jossey-Bass.
- OECD. (2015). Measuring and Monitoring BEPS, Action 11 - 2015 Final Report. In *International Dialogue on Migration*. OECD. <https://doi.org/10.1787/9789264241343-en>
- OECD. (2025). Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2025. In *OECD*. https://www.oecd.org/en/publications/revenue-statistics-in-asia-and-the-pacific-2023_e7ea496f-en.html
- Ovonji-Odida, H. I. (2024). State of Tax Justice 2024. In *Tax Justice Network* (Issue November). <https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2024/>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 4(1). <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Reinati, F. V. E., Hermawati, A., & Sodik. (2025). The Influence of Human Resource Development and Leadership on Employee Performance with Work Commitment as a Mediation. *International Journal of Economics and Management Research*, 5(1), 71–82.
- Saptono, P. B., Mahmud, G., Pratiwi, I., Purwanto, D., Khozen, I., Imantoro, L. W., & Wayan, M. E. (2024). Book-Tax Differences during the Crisis: Does Corporate Social Responsibility Matter? *Sustainability*, 16(17), 1–38. <https://doi.org/10.3390/su16177271>
- Sikka, P. (2015). The hand of accounting and accountancy firms in deepening income and wealth inequalities and the economic crisis: Some evidence. *Critical Perspectives on Accounting*, 30, 46–62. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2013.02.003>
- UNCTAD. (2015). United Nations Conference on Trade and Development World Investment Report 2015. In *United Nations Publication*. United Nations Publication. <https://doi.org/10.1787/9789264241343-en>
- Wartono, T., Hermawati, A., & Ariyanto, R. D. (2025). *Shelter Tourism : Konsep Wisata Edukasi Mitigasi Bencana untuk Destinasi Tangguh*. 4(3), 4521–4527.
- World Bank. (2025). *Open Knowledge Repository*. <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/ae80b23c-5bb3-4cf9-b8dd-df238292c575>